



JOGJA KITA

Strategi Pemkot Jogja dalam Menekan Volume Sampah yang Dibuang ke TPST Piyungan

Maksimalkan Bank Sampah, Sampah Organik untuk Pupuk

Persoalan sampah masih menjadi PR Pemkot Jogja. Karena selama ini masih mengandalkan TPST Piyungan, yang juga untuk pembuangan sampah dari Sleman dan Bantul. Peran warga dalam mengolah sampah mandiri menjadi salah satu solusi.

DEMIKIAN persoalan penting yang mengemuka dalam audiensi terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), bersama dengan Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) di Ruang Sadewa Balai Kota Jogja Selasa (29/12).

Menurut HP, Pemkot Jogja sejak beberapa tahun lalu sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan volume sampah yang akan dibawa menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan dengan memaksimalkan bank sampah.

Di Kota Jogja, lanjut dia, setidaknya ada 481 bank sampah aktif. Di bank-bank sampah tersebut, sampah dipilah antara sampah organik dan non organik. Di mana sampah-sampah organik oleh kampung-kampung sayur yang tersebar di Kota Jogja dikelola untuk dijadikan pupuk dan pakan ikan.

Pemkot Jogja, kata HP, sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan volume sampah dengan membuat bank-bank sampah baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. "Saat ini kurang lebih ada 481 bank sampah yang aktif. Namun, karena

tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, penumpukan sampah masih saja terjadi," kata HP.

Untuk mengatasinya, mantan wartawan itu, mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemkot juga perlu didukung dengan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) harus dijalankan dengan baik. "Berkaitan dengan hal ini Pemkot telah bekerjasama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta untuk pengolahan bagaimana bank sampah menjadi salah satu program kerajinan masyarakat," jelasnya.

Dwi Priyono, perwakilan dari LKY mengatakan, ada beberapa poin penting terkait dengan persoalan pengelolaan sampah di Kota Jogja, antara lain, Kota Jogja sebagai pusat wisata dan padat penduduk memiliki lahan yang terbatas, dan tingkat konsumsi yang tinggi. Keadaan-keadaan inilah yang menjadikan volume sampah di Kota Jogja cukup tinggi.

Menurut dia, keterbatasan lahan menjadi kendala terbesar bagi warga Kota Jogja dalam mengelola sampah. Mayoritas warga tidak memiliki lahan yang memadai untuk mengelola sampah.

"Faktor keterbatasan lahan ini juga berdampak pada minimnya tempat pembuangan sampah," kata Dwi.

Menyikapi permasalahan itu, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh Pemkot Jogja, di antaranya adalah perlunya pendidikan penyadaran tentang sampah, pelatihan dan pendampingan pengolahan sampah bagi bank sampah. "Serta optimalisasi bank-bank sampai baik di tingkat kecamatan, kelurahan maupun di tingkat RT dan RW," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Sugeng Darmanto mengatakan, ketika TPST Piyungan kembali ditutup oleh warha yang paling terkena dampak ialah kota Jogja. Sebab, kota merupakan wilayah kecil dan tidak memiliki lahan yang bisa digunakan sebagai penampungan sementara.

Untuk solusi jangka panjang, sama dengan HP, Sugeng menyebut perlunya kembali mengkampanyekan pengolahan sampah di masyarakat. Dia juga menghimbau masyarakat agar secara bijak dapat mengelola sampahnya secara mandiri dengan menerapkan sistem *reuse, reduce*, dan *recycle*.

Sedang untuk sampah organik, DLH Kota Jogja sudah memiliki rumah kompos di Umbulharjo, Jogja. Di sana sudah diolah berbagai sampah dedaunan. Hasilnya berupa pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan warga Kota Jogja. (**/pra/by)

Nilai Berita	Sifat
☐ Negatif	☐ Amat Segera
☐ Positif	☐ Segera
☐ Netral	☐ Biasa

Yogyakarta,



BERSIH-BERSIH: Petugas membersihkan sampah di tempat pembuangan sementara di sekitar Stadion Mandala Krida, Jogja, Minggu (20/12). Pemkot Jogja mengupayakan lebih banyak sampah yang bisa dikelola masyarakat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005